BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi peningkatan PAD tentang PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi merupakan suatu strategi yang di buat oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya akan di terapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk di realisasikan karena bertujuan untuk mewujudkan peningkatan PAD. Strategi untuk penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat memberikan informasi yang relevan kepada aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang akan membuat suatu strategi tentang peningkatan PAD.

Strategi untuk meningkatkan PAD tidak terlepas dari proses strategi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi itu sendiri. Dengan adanya indikator-indikator tersebut maka startegi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 dapat berjalan dengan optimal. Hasil dari sebuah strategi sangat penting untuk diketahui dalam pelaksanaan suatu organisasi, karena dapat dijadikan sebagai dasar acuan penentu keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian mengenai strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi terdiri dari waktu, dampak, pola-pola keputusan, pemutusan upaya, dan sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada indikator di bawah ini :

4.1 Waktu Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Waktu peningkatan PAD dalam melakukan penerimaan PBBP2 sangat diperlukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, karena dapat menentukan persiapan awal yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk melaksanakan peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2. Tahapan awal yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus dilakukan dengan cermat, sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat penerimaan PBBP2 dapat terlihat dengan jelas.

Waktu dalam strategi peningkatan PAD berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh aparatur yang terlibat dalam pembuatan strategi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang mempunyai wewenang yang tinggi guna memberikan suatu strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk membantu meningkatkan PAD khususnya PBBP2.

Usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan waktu mengenai strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dilakukan dengan cara memberikan waktu yang baik kepada aparatur dan para wajib pajak, agar strategi yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi terkait peningkatan PAD dapat berjalan dengan baik.

Kriteria waktu merupakan kriteria yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana suatu strategi yang telah dibuat dapat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Waktu mengenai strategi peningkatan PAD melalui penerimaan

PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mempunyai beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu ketepatan kinerja aparatur serta kecukupan dalam membuat strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Indikator tersebut di tunjukan untuk mengetahui sejauhmana waktu yang dihasilkan atas strategi peningkatan PAD tersebut. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

4.1.1 Ketepatan Kinerja Aparatur Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Kinerja aparatur adalah hasil kerja yang di capai oleh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dalam menjalankan strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 untuk melaksanakan tugas-tugas yang di berikan kepada aparatur.

Dalam mengukur suatu kinerja yang di hasilkan oleh seorang aparatur publik maka di perlukan usaha yang maksimal dari aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Atas hasil kerja yang di hasilkan sehingga dapat memuaskan kebutuhan para wajib pajak terkait peningkatan PAD Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yakni melalui penerimaan PBBP2, yang di nilai dari kinerja aparatur yaitu hasil kerja yang di hasilkan oleh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan PAD, di antaranya adalah petugas pemungut pajak. Dalam pelaksanaan penerimaan PBBP2 petugas pemungut pajak mempunyai peran yang sangat

penting yaitu mendata dan menagih yang di bebankan kepada petugas pemungut pajak atas pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Untuk menjadi petugas pemungut pajak di butuhkan pelatihan-pelatihan yang khusus dan untuk memberikan pelatihan itu bisa menghabiskan waktu sekitar 1 tahun, serta membutuhkan persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi pada tingkat pendidikan. Pemberian pelatihan yang di berikan kepada petugas pemungut pajak oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yaitu untuk memudahkan petugas pemungut pajak untuk menjalankan tugasnya dalam meningkatkan PAD khususnya melalui penerimaan PBBP2. Pelatihan tersebut di laksanakan setiap 3 bulan sekali dan yang mengikuti pelatihan ini harus memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan. Satu di antaranya di lihat dari tingkat pendidikan yakni maksimal S1 dan tidak hanya itu saja persyaratan yang di butuhkan dalam mengikuti pelatihan. Apartur pun harus benar-benar mengerti mengenai pajak khususnya tentang PBBP2 dan yang mengikuti pelatihan sampai saat ini sebanyak 20 orang.

Petugas pemungut pajak adalah jabatan fungsional yang di jalankan oleh seorang aparatur Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai petugas pemungut pajak. Petugas pemungut pajak membantu dalam proses peningkatan PAD melalui PBBP2.

Realisasi PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sampai saat ini mencapai Rp. 6,548,048,768,00 rupiah atau sebesar 78,72%. Namun target yang di inginkan masih kurang dari yang di harapkan karena target Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dalam penerimaan PBBP2 yaitu sebesar

8,318,050,254,00 rupiah. Kurangnya target yang di harapkan karena di akibatkan kurangnya petugas pemungut pajak dan sosialisasi yang tidak seimbang dengan wajib pajak yang ada di kota sukabumi. Sementara itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sampai saat ini masih mempertimbangkan dengan di tambahkan petugas pemungut pajak yang bisa membantunya dalam peningkatan PAD Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Di bawah ini adalah tabel data jumlah penduduk dan jumlah wajib pajak di Kota Sukabumi :

Tabel 4.1
Data Wajib Pajak per Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2013

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB PAJAK	POTENSI PAJAK
GUNUNGPUYUH	43.622 jiwa	19.055 WP	1,055,810,107,00
CIKOLE	56.775 jiwa	23.913 WP	3,258,625,543,00
CITAMIANG	47.580 jiwa	7.101 WP	958,032,314,00
WARUNG DOYONG	52.730 jiwa	20.871 WP	1,457,883,689,00
BAROS	29.526 jiwa	4.027 WP	394,724,224,00
CIBEUREUM	34.719 jiwa	11.302 WP	563,876,450,00
LEMBUR SITU	5.072 jiwa	2.391 WP	629,097,927,00

Sumber : BPS Kota Sukabumi 2013

Menurut hasil pengamatan peneliti pada tabel di atas, realisasi terbesar dari potensi di setiap kecamatan yaitu kecamatan cikole dan kecamatan warung doyong, kecamatan tersebut merupakan realisasi terbesar dalam penerimaan PBBP2.

Dalam meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, aparatur membuat konsep untuk bisa meningkatkan PAD pada sektor PBBP2 yaitu dengan cara membagi petugas pemungut pajak pada setiap kecamatan agar tidak ada data wajib pajak yang terlewat atau yang menunggak pada pembayaran PBBP2. Maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi membuat konsep agar bisa meningkatkan PAD pada penerimaan PBBP2 melalui membagi petugas pemungut pajak.

Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk bisa meningkatkan PAD kepada aparaturnya yaitu dengan memberikan motivasi kepada setiap aparatur untuk lebih teliti dalam mendata setiap wajib pajak agar apa yang di harapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan PAD pada penerimaan PBBP2, Karena peningkatan PAD itu merupakan hasil dari pembayaran wajib pajak dari setiap masyarakat.

Tugas seorang pemungut pajak tidak mudah, karena seorang petugas pemungut pajak harus bersikap baik dan jujur serta bertanggungjawab atas penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu kinerja yang di hasilkan oleh petugas pemungut pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD karena seharusnya hasil kerja yang telah di capai oleh seorang petugas pemungut pajak dapat berjalan dengan baik seiring dengan pelatihan kerja yang di lakukan oleh petugas pemungut pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi peningkatan pendapatan asli daerah mengatakan bahwa:

> "Kinerja yang di capai oleh petugas pemungut pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi khususnya dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan telah berjalan dengan baik. Karena di lihat dari peningkatan pendapatan asli daerah dapat terselesaikan dengan baik meskipun dengan berbagai hambatan yang terjadi". (1/6/2013)

Jika di lihat dari segi pelayanan, hasil kerja yang sudah di capai oleh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yakni petugas pemungut pajak cukup berjalan dengan baik.Karena sebagai petugas pemungut pajak dalam peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, aparatur telah melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal sehingga dapat mengurangi penunggakan pembayaran PBBP2 khususnya di Kota Sukabumi.

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mengatakan bahwa: "Kinerja aparatur dari Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi yang saya rasakan masih kurang baik, karena selama ini masih saja ada data-data nama wajib pajak yang tidak tercantum dalam pendataan wajib pajak". (2/6/2013)

Menurut hasil wawancara dengan wajib pajak di atas, bahwa masyarakat wajib pajak menganggap kinerja petugas pemungut pajak sebagai aparatur yang terlibat dalam strategi mengenai peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi perlu di perbaiki, karena masih ada saja data wajib pajak yang tidak ada dalam pendataan wajib pajak dan akhirnya terjadi banyak hambatan dalam peningkatan PAD tersebut. Oleh karena itu aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus lebih teliti dalam mendata wajib

pajak di setiap kelurahan agar data tersebut tidak lagi terjadi kesalahan dalam mendata.

Hasil pengamatan penelitian di lapangan bahwa usaha yang di lakukan oleh petugas pemungut pajak berjalan dengan baik dan mulai maksimal. Karena terlihat dari seorang petugas pemungut pajak dan masyarakat wajib pajak menuturkan bahwa di luar jam kerja mereka saling berkomunikasi guna memberikan saran maupun masukan-masukan atas peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pada penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan.

Sebagai seorang aparatur publik agar dapat memaksimalkan kinerja aparatur sebaiknya aparatur publik menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin dan tidak hanya mementingkan kepetingan perseorangan agar hasil kerja yang di capai oleh seorang petugas pemungut pajak dapat memuaskan masyarakat, sehingga penilaian atas kinerja yang di capai oleh seorang aparatur dapat berjalan dengan baik. Karena jika hasil kerja yang di peroleh ternyata tidak sesuai yang di harapkan, maka akan merugikan nama baik aparatur dan dapat di pandang sebelah mata oleh masyarakat khususnya para wajib pajak. Maka dari itu aparatur khususnya petugas pemungut pajak harus berlaku jujur dalam menjalankan tugasnya agar tercapainya hasil kerja yang maksimal dan dapat menghasilkan suatu kinerja yang maksimal.

Ketepatan kinerja aparatur dari peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sejauh ini belum bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut di karenakan para wajib pajak merasa ketepatan petugas pemungut pajak belum bisa

mempengaruhi hasil yang di peroleh atas di adakannya peningkatan PAD sebagai sesuatu yang di jalaninya untuk dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2. Bahkan dari pihak masyarakat merasa kurangnya aparatur yang melayani masyarakat untuk pembayaran pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Namun sejauh ini aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi khususnya petugas pemungut pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang baik guna membantu untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

4.1.2 Kecukupan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Kecukupan merupakan bagian yang terpenting dalam memuaskan kebutuhan masyarakat atas di adakannya strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Hal ini dapat menekankan pada hubungan antara aparatur dengan masyarakat agar dapat memperoleh hasil yang di harapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi pada peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Kecukupan di lakukan agar strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat memberikan suatu langkah yang baik atas penerimaan PBBP2. Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sesuai dengan UU. No. 28 Tahun 2009 dapat menghasilkan kecukupan yang memuaskan kebutuhan untuk para wajib pajak atas

hasil yang akan di capai dengan peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Dalam kecukupan permasalahan yang timbul yaitu di karenakan masih banyak aparatur yang tidak memiliki kecukupan untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2. Sehingga tidak dapat memberikan kepuasan terhadap hasil yang di peroleh dari strategi peningkatan PAD yang di jalani. Satu permasalahan yang ad di antaranya adalah kurangnya petugas pemungut pajak dalam penerimaan PBBP2 dan kurangnya waktu yang di berikan, maka dapat memperoleh dampak yang di hasilkan nanti tidak akan memuaskan kepada masyarakat khususnya pada wajib pajak itu sendiri.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sendiri harus lebih mendalami tentang strategi yang di buat dan mempunyai waktu yang cukup untuk membuat strategi. Karena menurut peneliti di lapangan, strategi yang di buat Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk meningkatkan PAD hanya mencapai 1 tahun lamanya. Namun bila strategi tersebut ingin mencapai hasil yang memuaskan, maka waktu yang di butuhkan harus lebih matang untuk bisa meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Kecukupan yang di butuhkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dalam meningkatkan PAD pada penerimaan PBBP2 di rasakan masih kurang, karena waktu yang di butuhkan untuk bisa meningkatkan PAD tersebut hanya 1 tahun lamanya. Dalam meningkatkan PAD Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus memerlukan waktu yang cukup matang agar peningkatan PAD

pada penerimaan PBBP2 dapat berjalan dengan baik dan apa yang kita harapkan bisa tercapai.

Jika aparatur memiliki kecukupan yang baik maka tugas dan fungsinya sebagai petugas pemungut pajak akan berjalan dengan baik serta perannya sebagai aparatur dapat di pertanggungjawabkan dengan baik atas strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2. Dalam memperoleh kecukupan yang baik, usaha yang di lakukan oleh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tidak semudah yang di bayangkan karena kecukupan yang di lakukan oleh aparatur di nilai dari segi masyarakat serta pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan menyebutkan bahwa

> "Kecukupan menyangkut peningkatan PAD belum dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat pada penerimaan PBBP2. Karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi itu sendiri belum bisa menambah petugas pemungut pajak dalam penerimaan PBBP2. Agar dapat memberikan kecukupan yang baik aparatur sendiri harus bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak meskipun di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi petugas pemungut pajak masih minim sekali". (3/6/2013)

Menurut penuturan Kepala Bidang Penagihan dan penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi di atas, kecukupan yang di peroleh atas strategi peningkatan PAD sejauh ini masih belum memuaskan. Karena permasalahan itu sendiri timbul dari kurangnya petugas pemungut pajak dan akan menghambat pada peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yaitu wajib pajak mengatakan bahwa :

> "Kecukupan atas peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 menurut saya masih belum bisa berjalan dengan maksimal, di karenakan hambatan terhadap penerimaan PBBP2 terjadi oleh petugas pemungut pajak yang tidak memadai. Sementara wajib pajak di Kota Sukabumi mencapai 87.779 juta jiwa. Maka dari itu kecukupan yang di peroleh belum bisa dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi". (3/6/2013)

Jika di lihat dari segi kurangnya aparatur dalam meningkatkan PAD, kecukupan yang di hasilkan atas penerimaan PBBP2 akan berjalan dengan baik dengan di tambahkannya petugas pemungut pajak khususnya untuk penerimaan PBBP2 agar dapat kecukupan pada peningkatan PAD dapat memberikan peningkatan yang baik pada penerimaan PBBP2.

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa usaha yang di lakukan oleh petugas pemungut pajak pada penerimaan PBBP2 belum cukup baik, namun kendalanya yang di hadapi yaitu kurangnya petugas pemungut pajak. Kecukupan pada peningkatan PAD itu sendiri masih sulit untuk di jalani, karena petugas pemungut pajak yang minim dan kurangnya waktu yang di berikan untuk dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Kecukupan untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 di rasakan masih kurang, karena waktu yang di berikan untuk bisa meningkatkan PAD hanya 1 tahun lamanya. Seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dalam membuat strategi harus mempunyai waktu yang cukup matang agar hasilnya nanti akan memuaskan dan tidak akan ada kendala yang di hadapi untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Untuk memaksimalkan kecukupan yang baik terhadap peningkatan PAD sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat segera menambahkan

petugas pemungut pajak yang hanya berjumlah 20 orang. Dengan kurangnya petugas pemungut pajak dan sementara wajib pajak yang ada di Kota Sukabumi mencapai 87.779, petugas pemungut pajak harus bekerja ekstra untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2. Karena jika petugas pemungut pajak bisa memberikan hasil yang maksimal maka peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 tidak akan berjalan dengan baik. Dengan hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus memperhatikan semua kendala atau kekurangan yang ada dengan waktu yang singkat hanya 1 tahun lamanya untuk bisa meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi .

4.2 Dampak Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Dampak merupakan hasil keputusan yang di ambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atas strategi yang telah dibuat untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Dampak dalam strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 berkaitan dengan usaha yang telah di lakukan oleh berbagai pihak yang telibat dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Dalam menjalankan strategi untuk PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mempunyai kendala, satu di antaranya adalah sebagian para wajib pajak yang tidak mengerti tentang strategi yang di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Dengan itu Dinas Pendapatan Daerah Kota

Sukabumi harus lebih memperhatikan dampak apa saja yang terjadi dalam di buatnya strategi tentang peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Usaha yang dilakukan untuk mengamati dampak atas strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada para wajib pajak yaitu para wajib pajak agar strategi yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi terkait peningkatan PAD dapat berjalan dengan baik.

Kriteria dampak merupakan kriteria yang sangat penting untuk mengetahui sejauhmana suatu strategi yang telah dibuat dapat berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Dampak mengenai strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mempunyai beberapa indikator yang mempengaruhi yaitu dampak bagi aparatur serta dampak bagi masyarakat dalam strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Indikator tersebut di ajukan untuk mengetahui bagaimana dampak yang di hasilkan atas strategi peningkatan PAD tersebut, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

4.2.1 Dampak Bagi Aparatur Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Dampak bagi aparatur adalah sesuatu yang timbul bagi aparatur terhadap peristiwa yang terjadi dalam meningkatkan PAD . Maksud dampak bagi aparatur dalam strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 adalah dampak

aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi khususnya petugas pemungut pajak terhadap adanya strategi mengenai peningkatan PAD.

Dampak bagi aparatur yang dirasakan di Dinas Pendapatan Daerah kota Sukabumi sangat berpengaruh guna menunjang berlangsungnya penerimaan PBBP2 sebagai suatu bentuk peningkatan pajak PAD yang di tangani oleh petugas pemungut pajak yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dengan strategi yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan strategi peningkatan PAD pasti mendapatkan dampak yang diperolehnya atas keikutsertaan terlibat dalam menjalankan tugas dan fungsi yang di bebankan kepadanya sesuai dengan kewajibannya sebagai aparatur publik. Dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai aparatur yang membantu dalam penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi melalui penerimaan PBBP2 sesuai dengan yang telah diatur dalam UU. No 28 Tahun 2009.

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai aparatur publik yang terlibat dalam strategi ini, seorang aparatur publik di tuntut untuk mempunyai kemampuan yang baik serta pengetahuan yang luas khususnya mengenai PBBP2 dan dapat memberikan contoh yang baik kepada bahawan maupun kepada masyarakat agar dapat bersikap dan baik dalam pemungutan pajak khususnya PBBP2.

Dibuatnya strategi mengenai peningkatan PAD di karenakan banyak pihak yang menilai bahwa peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 sudah tidak mampu membantu para aparatur untuk dapat meningkatan PAD. Stratgei yang

saat ini di gunakan yaitu sebagai acuan untuk dapat membuat respon yang baik dari pihak aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi karena di anggap strategi yang di buat ini bisa memenuhi keinginan para aparatur yang terlibat dalam meningkatkan PAD termasuk petugas pemungut pajak yang membantu dalam penerimaan PBBP2.

Dengan adanya strategi terkait peningkatan PAD, aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yakni petugas pemungut pajak memiliki hak yang mutlak untuk memutuskan dampak atas hasil dari penerimaan PBBP2. Hal ini pula di jadikan alasan sebagaian aparatur untuk memberikan dampak yang terjadi karena merasa bahwa sebagian aparatur telah menjalankan apa yang telah di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Sebagian aparatur, petugas pemungut pajak merasakan dampak dengan di adakannya peningkatan PAD. Satu di antaranya dampak yang di rasakan yaitu sulitnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena masih banyak wajib pajak yang tidak jelas akan hasil yang akan di capai pada peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 tersebut dan waktu yang di butuhkan untuk meningkatkan PAD hanya 1 tahun lamanya. Mereka mengatakan bahwa untuk meningkatkan PAD dibutuhkan waktu yang panjang agar aparatur sendiri bisa memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat tentang wajibnya membayar PBBP2. Aparatur sendiri masih merasakan hal yang berat, karena strategi terkait peningkatan PAD pula petugas pemungut pajak harus lebih ekstra bekerja keras untuk dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 karena kurangnya petugas pemungut pajak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petugas pemungut pajak yang sedang menangani penerimaan PBBP2 di peroleh informasi bahwa :

> "Dampak saya terhadap strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi saat ini masih belum bisa terselesaikan, karena menurut saya strategi yang telah di buat belum bisa membantu untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2". (12/6/2013)

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pembukuan. Peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mengatakan bahwa :

> "Dengan adanya strategi ini dampak yang terjadi atas peningkatan PAD aparatur belum cukup memuaskan, karena saya rasakan strategi ini terkait peningkatan PAD khususnya di Kota Sukabumi belum cukup memenuhi semua keinginan aparatur dalam penerimaan PBBP2". (12/6/2013)

Menurut penuturan dari aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi di atas, dapat di ketahui dampak yang mereka peroleh atas di adakannya strategi mengenai peningkatan PAD sejauh ini belum bisa berjalan dengan baik dan tidak memuaskan. Khususnya dengan adanya penerimaan PBBP2 sebagai salah satu proses untuk peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Aparatur menambahkan, Jika Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi dapat menambahkan petugas pemungut pajak dalam meningkatkan PAD dan waktu yang di berikan itu cukup dalam peningkatan PAD, maka tidak akan ada dampak yang terjadi dari aparatur sendiri.

Hasil dari pengamatan peneliti pada saat di lapangan bahwa faktanya dampak dengan adanya strategi yang di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tentang peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi nyatanya belum bisa memberikan dampak yang baik dari para aparatur Dinas

Pendapatan Daerah Kota Sukabumi selaku yang menjalankan strategi. Karena strategi ini di anggap belum memenuhi hak-haknya selaku para aparatur yang terlibat dalam peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus bisa menyelesaikan dampak apa yang di rasakan oleh aparatur terkait dengan peningkatan PAD. Strategi yang di anggap belum memenuhi kebutuhan para aparatur pula di anggap sebagai hal yang dapat mempengaruhi baik atau tidaknya hasil dari penerimaan PBBP2 yang di jalankan oleh para petugas pemungut pajak.

Dampak yang di rasakan bagi aparatur khususnya petugas pemungut pajak dari peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sangat berdampak terhadap hasil kerja yang di capainya sebagai pihak yang terlibat dalam peningkatan PAD. Dampak yang di rasakan aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sebenarnya di peroleh akibat adanya strategi yang telah di buat, karena aparatur merasa belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai petugas pemungut pajak yang dapat membantu dalam meningkatkan PAD dengan baik.

4.2.2 Dampak Bagi Masyarakat Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Dampak bagi masyarakat adalah sesuatu yang timbul bagi para wajib pajak setelah di adakannya strategi peningkatan PAD yang di buat oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi melalui penerimaan PBBP2. Dalam hal ini

dampak yang diperoleh sebagai yang terlibat dalam peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi,

Masyarakat yang terlibat dalam strategi peningkatan PAD dapat merasakan dampak yang di hadapi atas peningkatan PAD tersebut. Jika setelah di lakukannya strategi yang di pilih untuk penerimaan PBBP2, maka masyarakat dapat melaporkan dampak dari hasil pelaksanaan peningkatan PAD kepada para petugas pemungut pajak yang selanjutnya akan di tangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Dalam penerimaan PBBP2 masyarakat dapat memberikan saran atau masukan tentang strategi untuk peningkatan PAD, karena peningkatan PAD yang sedang di jalani saat ini belum bisa memberikan hasil yang memuaskan.

Di lihat dari hasil tahun lalu peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 masih mempunyai tunggukan PBBP2. Tunggakan PBBP2 itu sendiri di akibatkan karena ketidaktahuanya masyarakat tentang batas pembayaran SPPT sampai waktu yang di tentukan dan akhirnya masyarakat tersebut tidak membayar pajak karena kurangnya pemberitahuan dari aparatur dalam pembayaran PBBP2. Maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus bisa memberikan solusi agar dampak yang terjadi kepada masyarakat atas peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Kota Sukabumi dapat terselesaikan dengan baik.

Strategi yang di buat Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi terkait peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 yang di terapkan belum dapat membantu mengurangi tunggakan-tunggakan yang saat ini masih ada, sehingga dampak bagi masyarakat yang di peroleh atas adanya penerimaan PBBP2 pada

strategi peningkatan PAD tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat memuaskan masyarakat khususnya para wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang sedang membayar PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mengatakan bahwa :

> "Dampak yang saya rasakan sebagai masyarakat yang menerima atas strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 belum bisa memuaskan masyarakat terhadap penerimaan PBBP2, karena dengan peningkatan PAD sendiri menurut saya apa yang di inginkan belum bisa berjalan dengan baik atas penerimaan PBBP2 ini. Agar peningkatan PAD ini dapat berjalan dengan baik dan tidak berkepanjangan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi Harus bisa memberikan solusi agar dampak yang terjadi pada masyarakat tidak terjadi lagi di kemudian hari". (12/6/2013)

Dari hasil wawancara dengan salah seorang wajib pajak di ketahui bahwa dampak yang di hasilkan dengan adanya penerimaan PBBP2 terkait strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi tersebut belum cukup baik dan bisa berdampak buruk terhadap peningkatan PAD. Karena dengan adanya strategi ini di anggapnya belum bisa untuk membantu meningkatkan PAD khususnya pada penerimaan PBBP2. Maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus dapat menyelesaikan dampak apa saja yang di rasakan terkait adanya strategi peningkatan PAD agar apa yang di harapkan bisa tercapai dengan baik.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang sedang mengurusi pembayaran pajak mengatakan bahwa :

> "Jika persoalan dampak saya terhadap strategi peningkatan PAD terkait penerimaan PBBP2 menurut saya biasa-biasa saja, artinya saya tidak mengatakan baik atau buruk tetapi saya mencoba untuk mengetahui sendiri

bagaimana strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 dapat menimbulkan berbagai dampak yang terjadi". (12/6/2013)

Menurut wawancara peneliti yang di peroleh dari masyarakat ternyata dari segi masyarakat sendiri belum bisa merasa puas terhadap mengharapkan penerimaan PBBP2 dapat tercapai suatu peningkatan PAD yang baik. Namun dalam kenyataannya memang terjadi dampak antara masyarakat dengan aparatur yang terlibat dalam peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan faktanya bahwa permasalahan mengenai dampak yang terkait peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di sebabkan karena kurangnya informasi dari petugas pemungut pajak tentang pembayaran SPPT kepada masyarakat. Namun jika sosialisasi itu bisa berjalan dengan baik makan dampak yang di peroleh dengan adanya penerimaan PBBP2 bisa terlaksana dengan baik dan tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan terhadap peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Untuk menyelesaikan dampak mengenai peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya di lakukan oleh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi saja, akan tetapi masyarakat pun harus sadar akan membayar pajak agar strategi peningkatan PAD melalui pnerimaan PBBP2 dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak yang terjadi dari berbagai pihak. Karena jika strategi tersebut dapat berjalan dengan baik tentu akan berpengaruh terhadap hasil atas peningkatan PAD khususnya pada penerimaan PBBP2.

Dampak yang di rasakan masyarakat atas adanya penerimaan PBBP2 untuk peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sejauh ini

berdampak kurang baik, masyarakat menghargai strategi yang telah di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi berserta aparaturnya khususnya petugas pemungut pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk dapat meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 meskipun sampai saat ini masyarakat masih merasa kurang baik dengan adanya peningkatan PAD yang tidak dapat berjalan dengan baik.

4.3 Pola-Pola Keputusan Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Pola-pola keputusan adalah suatu pola yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi melalui penerimaan PBBP2 untuk mencapai hasil dan tujuan yang di inginkan oleh para wajib pajak dalam meningkatkan PADnya.

Pola-Pola Keputusan yang di lakukan oleh aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi atas berlakunya UU. No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk memaksimalkan UU. No 28 Tahun 2009 yagsudah di buat oleh pemerintah agar dapai mencapai hasil yang di harapkan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sejauh ini dalam membuat keputusan dalam peningkatan PAD hanya bertugas membuat keputusan saja. Selanjutnya yang bertugas menjalankan keputusan ini adalah aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang bertugas untuk meningkatkan PAD

khususnya pada penerimaan PBBP2. Dalam menunjang keberhasilan keputusan yang telah di buat serta menghasilkan pola-pola keputusan yang baik maka aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan suatu keputusan serta terkait dari strategi yang telah di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi agar dapat membantu meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Dalam meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 masih banyak menimbulkan masalah, yang timbul baik dari aparatur maupun dari para wajib pajak. Permasalahan terkait penerimaan PBBP2 belum mampu memberikan kepuasan kepada setiap wajib pajak, sehingga tidak dapat berjalan dengan baik atas di buatnya strategi peningkatan PAD yang berpengaruh kepada pola-pola keputusan yang di peroleh di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Keputusan mengenai strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mempunyai beberapa indikator yang harus di perhatikan seperti pencapaian sasaran, dan optimalisasi dalam meningkatkan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Indikator tersebut di arahkan untuk mengetahui bagaimana pola-pola keputusan dari strategi peningkatan PAD tersebut, untuk jelasnya sebagai berikut :

4.3.1 Pencapaian Sasaran Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Pencapaian sasaran adalah pernyataan yang sudah di identifikasikan dan di ekspresikan secara spesifik untuk menunjukan bagaimana strategi penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat dicapai dalam waktu yang tersedia.

Dalam strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi melalui penerimaan PBBP2, pencapaian yang di peroleh atas strategi yang telah berjalan saat ini apakah strategi yang terkait dengan PBBP2 dapat berjalan sesuai dengan yang telah di tentukan serta bagaimana usaha yang di lakukan agar strategi peningkatan tersebut dapat di capai dalam waktu yang cukup yang terdapat di Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi.

Untuk bisa membuat strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi melalui penerimaan PBBP2 menjadi tepat pada sasaran, maka hal tersebut harus di perhatikan mengenai siapa sasaran dari di adakannya strategi tersebut, serta apa saja yang di butuhkan untuk menunjang berjalannya strategi tersebut.

Pencapaian sasaran yang di peroleh dengan adanya strategi mengenai peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 dapat meningkat dan apakah strategi yang telah di buat dapat tepat pada sasaran atau tidak. Permasalahan pencapaian sasaran yang terkait masih ada kendala, yaitu pada peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 terkadang tidak tepat pada sasaran.

Sasaran yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dalam meningkatkan PAD yaitu para wajib pajak, merekalah yang bisa membantu untuk meningkatkan PAD pada penerimaan PBBP2. Tidak hanya wajib pajak saja, akan tetapi aparatur pun ikut dalam sasaran tersebut, karena aparatur bertugas untuk membantu para wajib pajak dalam pembayaran PBBP2 dan membantu dalam meningkatkan PAD yang di inginkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Pencapaian sasaran yang di hasilkan oleh Dinas Pendapatan Deerah Kota Sukabumi di lihat dari potensi pajak dari setiap 7 kecamatan di Kota Sukabumi yaitu kecamatan cikole, kecamatan baros, kecamatan warung doyong, kecamatan cibeureum, kecamatan citamiang, kecamatan lembur situ dan kecamatan gunung puyuh.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah seorang Kepala Bidang pendataan dan penyuluhan yang menangani penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan menyebutkan bahwa:

> "Pencapaian Sasaran yang di peroleh dengan di adakannya strategi tentang penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sejauh ini sedikit demi sedikit telah tepat pada sasaran yang berjalan dengan baik. Contonya yaitu setiap kecamatan telah mendata setiap wajib pajak dengan benar meskipun masih ada kecamatan-kecamatan yang belum bisa optimal terhadap mendata wajib pajak". (7/6/2013)

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang wajib pajak yang mengerti tentang strategi yang di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mengatakan bahwa:

> "Sejauh ini strategi untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi memang belum semuanya mendekati pencapaian sasaran yang di inginkan, karena

> penerimaan PBBP2 itu sendiri baru dialihkan ke pemerintah daerah yang tadinya masih di urus oleh pemerintah pusat". (7/6/2013)

Mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, seharusnya waktu yang di butuhkan untuk melakukan strategi peningkatan PAD adalah 1 tahun atau bahkan bisa kurang dari itu. Karena membuat strategi itu tidak semudah yang di bayangkan, harus banyak point-point yang harus di pelajari.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sudah cukup baik, namun kembali kepada aparatur yang menjalaninya saja yang harus benar-benar melakukan strategi itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan strategi di jalankan dengan baik akan meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 itu tidak mengalami berbagai kendala dan dapat berjalan dengan baik.

Pencapaian sasaran di lakukan agar terlaksananya pencapaian sasaran dengan baik dan tepat, tetapi faktanya belum bisa meningkatkan kualitas pelayanan aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi khususnya petugas pemungut pajak yang kurang memadai dan tentunya akan mempengaruhi terhadap peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 meskipun pencapaian sasaran sedikit demi sedikit telah tepat pada sasaran yang baik. Namun jika aparaturnya kurang memadai dapat menghambat pula dalam pencapaian sasarn yang telah di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

4.3.2 Optimalisasi Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Optimalisasi adalah proses untuk mencapai hasil yang paling maksimal dari di buatnya strategi mengenai peningkatan PAD melalui PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Optimalisasi dalam peningkatan PAD dilakukan dengan penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sebagai suatu peningkatan PAD.

Optimalisasi dibutuhkan agar peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dapat terlaksana dengan optimal dan menghasilkan suatu bentuk peningkatan secara baik. Dalam melakukan penerimaan PBBP2 guna untuk mengoptimalkan peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, diperlukan kerja sama yang baik terhadap aparatur dengan masyarakat. Hubungan yang baik antara aparatur dan masyarakat dapat menunjang keberhasilan suatu strategi agar dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pada hal penerimaan PBBP2, petugas pemungut pajak di bantu dari petugas kelurahan untuk mendata para wajib pajak yang ada di setiap kelurahan. Pendataan kembali di lakukan agar tidak ada lagi data wajib pajak yang terlewat atau hilang dalam pembayaran PBBP2. Karena data para wajib pajak tersebut sering terjadi kehilangan atau tidak terdata oleh petugas pemungut pajak. Maka dari itu petugas pemungut pajak bekerjasama dengan pihak instansi terkait agar peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan, Peningkatan PAD Kota Sukabumi menyebutkan bahwa :

> "Untuk mengoptimalkan strategi menyangkut PBBP2 telah dilakukan dengan maksimal, satu di antaranya yaitu dengan di adakannya pendataan kembali kesetiap rumah per kecamatan agar tidak ada lagi penyimpangan terhadap penerimaan PBBP2 tersebut". (3/6/2013)

Kepala bidang penagihan dan pembukuan menambahkan bahwa pendataan kembali terhadap wajib pajak dilakukan agar petugas pemungut pajak dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik dan tidak ada permasalahan tentang PBBP2 yang saat ini sedang buming di bicarakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemungut pajak mengatakan bahwa:

> "Pendataan kembali tidak hanya dilakukan terhadap wajib pajak saja, namun pendataan pun dilakukan terhadap aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi khususnya para petugas bidang penagihan yang berkaitan dengan penerimaan PBBP2 agar dapat mengoptimalkan strategi yang telah di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi, dan sejauh ini menurut saya untuk mengoptimalisasi terhadap peningkatan PAD sudah berjalan dengan cukup optimal". (5/6/2013)

Pendataan yang dilakukan oleh petugas pajak terhadap para wajib pajak terkait dengan strategi penerimaan PBBP2 dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap para petugas pemungut pajak agar bisa mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai penerimaan PBBP2 sesuai dengan di adakannya pendataan kembali terhadap wajib pajak dapat membantu meningkatkan PAD yang diharapkan.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara terhadap wajib pajak di Kota Sukabumi mengatakan bahwa:

> “Sejauh ini usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatn daerah Kota Sukabumi untuk meningkatkan PAD khususnya penerimaan PBBP2 belum optimal. Karena masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki melalui strategi tersebut”. (5/6/2013)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di peroleh oleh peneliti baik dari aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi maupun para wajib pajak itu sendiri sejauh ini belum dapat berjalan dengan optimal. Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa belum optimalnya peningkatan PAD terhadap penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi di sebabkan karena kurangnya kepedulian terhadap masyarakat tentang wajibnya pembayaran pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang luas mengenai peningkatan PAD agar tidak terjadi penerimaan PBBP2 yang menyimpang.

Sementara itu permasalahan yang terjadi terhadap penerimaa PBBP2 di karenakan banyaknya para wajib pajak di daerah Kota Sukabumi yang acuh tentang pembangunan rumahnya masing-masing dan tidak melapor kepada petugas pemungut pajak sehingga pembayaran pajak tersebut tidak seimbang dengan hasil pembangunan rumahnya yang mereka miliki. Maka dari itu petugas pemungut pajak harus ekstra teliti dalam mendata para wajib pajaknya pada setiap kelurahan atau kecamatan. Ketidak telitian petugas pemungut pajak dalam mendata para wajib pajak bisa mengakibatkan strategi yang telah di buat untuk meningkatkan PAD tidak berjalan dengan baik dan bisa mengakibatkan penunggakan terhadap PBBP2 tersebut. Dengan petugas pemungut pajak dapat mendata para wajb pajak dengan baik, dan masyarakat pun sadar akan membayar

pajak, maka yang di harapkan untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 bisa tercapai dengan baik.

Penyebab lainnya dari aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yaitu petugas pemungut pajak, meskipun untuk menjadi petugas pemungut pajak harus bisa mempelajari persyaratan-persyaratan yang telah di buat. Petugas pemungut pajak pun harus ahli dalam bidang perpajakan, tidak hanya memungut pajak saja.

Berdasarkan hasil peneliti di lapangan strategi mengenai penerimaan PBBP2 sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh para aparatur Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi saja, tetapi dilakukan oleh para wajib pajak selaku penerima strategi agar usaha yang dilakukan secara bersama bisa berjalan dengan baik. Karena jika strategi tersebut dapat berjalan dengan optimal akan berpengaruh terhadap hasil akhir atas penerimaan PBBP2.

Kurangnya perhatian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi selaku pembuat strategi seputar sumber daya manusia yang mendukung penerimaan PBBP2 yang di jalani oleh para petugas pemungut pajak selaku pelaksana strategi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Optimalisasi dari peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sejauh ini belum bisa optimal menurut sebagian pihak khususnya para wajib pajak. Karena dari para wajib pajak merasa Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dengan aparaturnya belum dapat mengoptimalan strategi tersebut dan belum bisa untuk meningkatkan PAD yang saat ini sedang di jalaninya melalui penerimaan PBBP2. Namun ada sebagian para wajib pajak yang beranggapan bahwa usaha yang di

lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi dengan aparaturnya sedikit demi sedikit sudah berjalan dengan cukup optimal, namun masih ada yang harus di perbaiki agar peningkatan PAD dapat berjalan dengan optimal.

4.4 Pemutusan Upaya Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Pemutusan upaya merupakan pemahaman dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk membantu permasalahan yang terjadi dalam peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2. Dalam mencapai tujuan yang di harapkan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi memutusan upaya apa saja yang akan di ambil dalam meningkatkan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Untuk memperoleh upaya yang baik dalam strategi peningkatan PAD, Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi selaku instansi pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2 dan berusaha memberikan pelayanan yang baik guna memperoleh pemutusan upaya yang baik dengan menerapkan peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Pemutusan upaya yang di hasilkan atas di adakannya strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sangat penting untuk di ketahui dan di jadikan bahan untuk selanjutnya dapat di ketahui apa saja hal yang kurang memuaskan para wajib pajak dalam strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sehingga dapat melihat apa saja yang kurang dari aparatur terhadap adanya pemutusan upaya.

Sejauh ini permasalahan tentang pemutusan upaya yang di peroleh dari hasil penerimaan PBBP2 guna meningkatkan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi bagi sebagian pihak di rasakan sangat mempengaruhi terhadap berlangsungnya strategi tersebut sebagai acuan dalam peningkatan PAD. Strategi yang dapat memberikan upaya yang baik dari para wajib pajak di dalamnya dapat berpengaruh terhadap kelancaran serta ke efektifan strategi yang telah di buat oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi.

Pemutusan upaya sangat di butuhkan guna menunjang berlangsungnya penerimaan PBBP2 sebagai suatu bentuk peningkatan PAD yang di tangani oleh aparatur yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sesuai dengan strategi yang di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2. Dengan adanya strategi terkait peningkatan PAD, aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yaitu petugas pemungut pajak memiliki hak untuk memutuskan atas hasil dari penerimaan PBBP2 memberikan pemutusan upaya yang baik untuk peningkatan PAD.

Sebagai aparatur, mereka merasa cukup puas dengan di adakannya strategi melalui penerimaan PBBP2 karena sebagai satu cara untuk meningkatkan PAD. Mereka mengatakan pula bahwa dalam meningkatkan PAD merupakan hal yangsangat sulit, karena banyak permasalahan yang terjadi akibat adanya strategi tersebut. Dengan adanya strategi terkait peningkatan PAD ini pula penerimaan PBBP2 dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi saat ini.

Pemutusan upaya yang di lakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk meningkatkan PAD di sambut dengan baik oleh para aparatur, dapat di lihat dari hasil kerja aparatur terhadap penerimaan PBBP2. Meskipun usaha tersebut masih belum bisa di rasakan oleh sebagian aparatur, tetapi strategi yang di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk meningkatkan PAD sudah berjalan dengan baik. Upaya tersebut dapat di lihat dari petugas pemungut pajak yang antusias untuk datang kepada setiap rumah untuk mendata para wajib pajak dan memberikan suatu pengarahan tentang pentingnya membayar pajak. Petugas pemungut pajak dalam menjalankan penerimaan PBBP2 tidak hanya sendiran, tetapi di bantu pula oleh instansi yang terkait, yang di tugaskan untuk pemungutan pajak. Karena wajib pajak yang ada di di Kota Sukabumi tidak sedikit dan dan aparatur pemungut pajak pun harus bisa membagi tugas-tugasnya di setiap kelurahan atau kecamatan meskipun petugas pemungut pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang aparatur yang sedang memungut pajak, di peroleh informasi bahwa :

> “Pemutusan upaya terhadap Strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi saat ini baik, karena menurut saya strategi ini lebih membantu para aparatur dalam meningkatkan PAD khususnya pada penerimaan PBBP2 dan di bantu pula oleh pihak instansi terkait untu membantu penerimaan PBBP2”. (12/6/2013)

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang pendataan dan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mengatakan bahwa :

> “Dengan adanya strategi peningkatan PAD ini, pemutusan upaya cukup baik. Karena saya rasa strategi ini terkait peningkatan PAD khususnya di

Kota Sukabumi dapat memuaskan semua para wajib pajak sehingga dapat membantu dalam meningkatkan PAD". (12/6/2013)

Menurut penuturan dari aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi di atas, dapat di ketahui bahwa pemutusan upaya yang di peroleh atas di adakannya strategi mengenai peningkatan PAD sejauh ini berjalan dengan baik, khususnya dengan penerimaan PBBP2 sebagai suatu proses untuk meningkatkan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa dengan adanya strategi yang di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi nyata memberikan upaya yang baik dari pihak aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi selaku pelaksana strategi. Karena strategi ini di anggap bisa membantu untuk peningkatan PAD khususnya pada penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.

Strategi yang di anggap telah memenuhi kebutuhan para wajib pajak di anggaplah aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sebagai hal yang dapat berpengaruh baik terhadap hasil dari penerimaan PBBP2 yang di jalankan oleh para aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi guna untuk meningkatkan PAD. Karena sejauh ini UU. No. 28 tahun 2009 telah membantu pemasukan atas pengalihan PBBP2 menjadi pajak daerah.

4.5 Daya Meresap Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Daya meresap merupakan suatu rencana yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi berupa sumber daya, baik kepada aparatur

maupun kepada instansi yang terkait menyangkut peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi melalui penerimaan PBBP2. Dalam hal ini daya meresap di maksudkan agar strategi yang telah di buat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi terkait peningakatan PAD dapat terwujudkan dengan baik terhadap para wajib pajak tersebut.

Daya meresap untuk menunjang kebutuhan masyarakat menyangkut strategi yang di jadikan acuan untuk peningkatan PAD. Usaha yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi guna daya meresap yaitu untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat terkait strategi yang di gunakan untuk peningkatan PAD agar tidak terjadi kesimpangan informasi antara para aparatur yang terlibat dalam strategi peningkatan PAD yaitu para wajib pajak, sehingga seluruh informasi mengenai strategi tersebut dapat tersampaikan denagn baik dan merata.

Kriteria daya meresap atas strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi memiliki indikator yang harus di perhatikan yaitu sumber daya manusia dalam strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Indikator tersebut di gunakan untuk mengetahui bagaimana daya meresap mengenai strategi peningkatan PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk lebih jelasnya akan di jelaskan sebagai berikut :

4.5.1 Sumber Daya Atas Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi

Sumber daya Manusia (SDM) sangat penting dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan karena sumber daya manusia merupakan penggerak pelaksanaan suatu kegiatan dan program yang di tetapkan sebelumnya demi mencapai tujuan yang akan di capai oleh suatu instansi atau organisasi. Sumber daya aparatur merupakan kebutuhan mutlak yang di laksanakan pada setiap kinerja dalam suatu organisasi yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar pelayanan informasi kepada masyarakat. Sumber daya aparatur mutlak di perlukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi untuk menciptakan sebuah kinerja yang baik melalui peningkatan PAD melaui penerimaan PBBP2.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan dan berkaitan dengan adanya strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yang di gunakan dalam pelaksanaan peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2. SDM yang diperlukan dalam menunjang strategi mengenai peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi yakni petugas pemungut pajak yang di fungsikan sebagai penerima pembayaran pajak antara wajib pajak yaitu masyarakat. Sementara itu sumber daya yang berkaitan dengan strategi peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 yaitu fasilitas yang di butuhkan untuk menunjang terlaksananya peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2.

Pelaksanaan penerimaan PBBP2 di butuhkan fasilitas yang mendukung, guna menunjang proses peningkatan PAD dalam pelaksanaan PBBP2 . Satu di antaranya yaitu fasilitas yang sangat di perlukan yaitu komputer karena komputer yang saat ini masih kurang menadai yang hanya 3 buah komputer saja, dan ruangan tempat pembayaran pun yang tidak memadai untuk pembayaran PBBP2 karena untuk memudahkan penerimaan pajak tentu harus memliki fasilitas yang memadai dan ruangan yang baik karena dengan fasilitas yang baik itulah proses penerimaan PBBP2 dapat berjalan dengan baik, dan memudahkan untuk mencari data-data petugas pajak Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi. Fasilitas yang di butuhkan tidak hanya komputer saja, tetapi ruangan tempat pembayaan pajak harus lebih di perhatikan.Karena di lihat dari peneliti di lapangan ruangan untuk pembayaran pajak kurang memadai dan tidak cocok untuk di jadikan tempat pembayaran pajak.

Sumber daya adalah hal yang sangat penting untuk di perhatikan dalam membuat strategi, karena jika sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan maka strategi yang telah di buat terkait penerimaan PBBP2 tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus memperhatikan kebutuhan apa saja yang di perlukan dalam meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi menyebutkan bahwa:

“Sumber daya yang diperlukan belum cukup memadai, satu diantaranya yaitu dengan di perlukannya beberapa komputer untuk menginput data-data tentang wajib pajak, dan kurangnya petugas pemungut pajak yang harus di tambahkan. Karena dengan kurangnya alat yang dibutuhkan dan kurangnya petugas pemungut

pajak dapat berpengaruh terhadap lambatnya penerimaan PBBP2 tersebut". (7/6/2013)

Menurut hasil wawancara peneliti kepada aparatur, dapat di ketahui pula bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi masih kurang untuk dapat membantu para pemungut pajak untuk menyelesaikan penerimaan PBBP2 yang di hadapi. Satu di antaranya karena petugas pemungut pajak di Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi yang masih kurang hanya berjumlah 20 orang.

Sementara jika di bandingkan dengan jumlah wajib pajak berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi, untuk di Kota Sukabumi jumlah wajib pajak berjumlah 87.779 orang. Hal ini dapat membawa pengaruh terhadap lambatnya penerimaan PBBP2, di karenakan kurangnya petugas pemungut pajak yang kurang memadai saat ini. Maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus lebih meningkatkan atau menambahkan petugas pemungut pajak agar peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 dapat berjalan dengan optimal.

Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan guna menyelesaikan penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. Jika petugas pemungut pajak yang tersedia hanya berjumlah 20 orang sementara permasalahan yang sering terjadi pada setiap pembayaran pajak banyak data-data yang tidak sama dengan petugas pemungut pajak dan petugas yang mendata wajib pajak di setiap kecamatan. Permasalahan ini sangat berpengaruh terhadap proses peningkatan PAD yang di hadapi oleh petugas pemungut pajak, karena itu Dinas

Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus menambah petugas pemungut pajak agar apa yang di harapkan bisa berjalan dengan optimal.

Sementara itu hasil wawancara para wajib pajak di Kota Sukabumi mengatakan bahwa :

"Dalam melaksanakan penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi ruang khusus untuk pembayaran pajak itu sendiri masih kurang, karena di lihat dari tempat duduk untuk menunggu pembayaran pajak tidak layak dan berdesak-desakan membayar pajak tersebut dan harus di perbaiki dalam sarana dan prasarananya". (6/6/2013)

Dari hasil wawancara dengan para wajib pajak di sebutkan bahwa banyak yang mengeluhkan sumber daya aparatur yakni petugas pemungut pajak yang kurang memadai, dan mereka pun mengatakan bahwa petugas pemungut pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi masih kurang bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Para wajib pajak berharap Pemerintah harus lebih memperhatikan persoalan mengenai fasilitas-fasilitas terutama pada komputer yang hanya berjumlah 3 komputer saja, ruangan yang kecil untuk pembayaran pajak dan kursi yang hanya beberapa buah dengan fasilitas yang kurang memadai. Maka pembayaran tersebut tidak akan berjalan dengan baik kecuali Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi bisa menambah dan mengganti semua fasilitas yang ada di tempat pembayaran pajak dan petugas pemungut pajak agar dapat membantu dalam menyelesaikan PBBP2.

Sumber daya manusia yang tidak memadai dan tidak memenuhi SPM dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap proses peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 antara petugas pemungut pajak dan para wajib pajak.

Karena dengan sumber daya manusia yang tersedia yang tidak mendukung maka strategi yang telah di buat tidak akan berjalan dengan efisien.

Hasil pengamatan penelitian banyak menemukan persoalan sumber daya baik sumber daya manusia maupun dengan lainnya terkait peningkatan PAD melalui penerimaan PBBP2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sangat kurang memadai. Meskipun sumber daya manusia yakni petugas pemungut pajak sudah cukup baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya, akan tetapi masih saja kurangnya petugas pemungut pajak untuk membantu para wajib pajak dalam masalah pembayaran PBBP2 itu sendiri.

Di bawah ini adalah daftar nama petugas pemungut pajak Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi :

Table 4.2

Daftar Nama Pemungut Pajak

No.	Nama Petugas Pemungut Pajak	Jabatan
1	**Nana Sutrisna**	**Petugas Pemungut PBB**
2	**Muhammad Sini**	**Petugas Pemungut PBB**
3	**Idang Diyari**	**Petugas Pemungut PBB**
4	**Abdul Rojak**	**Petugas Pemungut PBB**
5	**Iwan Hartawan**	**Petugas Pemungut PBB**
6	**Dadang Sulaeman**	**Petugas Pemungut PBB**
7	**Pepen Efendi**	**Petugas Pemungut PBB**
8	**Suhaendi**	**Petugas Pemungut PBB**
9	**Jaekasih**	**Petugas Pemungut PBB**

10	**Mamat rahmat**	**Petugas Pemungut PBB**
11	**Sumarno**	**Petugas Pemungut PBB**
12	**Trisnawan**	**Petugas Pemungut PBB**
13	**Ali Sakidin**	**Petugas Pemungut PBB**
14	**Noviar Gunawan**	**Petugas Pemungut PBB**
15	**Jajang Suparman**	**Petugas Pemungut PBB**
16	**Indra Sakti Budi Suparman**	**Petugas Pemungut PBB**
17	**Dede Lukmanulhakim**	**Petugas Pemungut PBB**
18	**Yayan Rukmana**	**Petugas Pemungut PBB**
19	**Erfin Arifin**	**Petugas Pemungut PBB**
20	**Ahmad Komarudin**	**Petugas Pemungut PBB**

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Sukabumi 2013

Jika di lihat dari daftar nama petugas pemungut pajak di atas, dapat di simpulkan bahwa petugas pemungut pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi hanya berjumlah 20 0rang. Sementara di lihat dari data wajib pajak yang ada di Kota Sukabumi mencapai 87.779 orang. Untuk bisa meningkatkan PAD melalui penerimaan PBBP2, Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi harus lebih menambah lagi petugas pemungut pajak tersebut. Karena jika di lihat dari data wajib pajak yang ada di Kota Sukabumi tidak sebanding dengan petugas pemungut pajak yang hanya berjumlah 20 orang, sementara data wajib pajak yang ada berjumlah 87.779 orang.

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi sebagai pembuat strategi seharusnya memperhatikan permasalahan sumber daya baik menambah

petugas pemungut pajak dan menyediakan fasilitas-fasilitas guna tercapainya peningkatan PAD yang baik di Dinas Pendapatan daerah Kota Sukabumi. Di lihat dari ketidak tersediaanya ruangan yang tidak memadai untuk pembayaran pajak khususnya PBBP2 dan para wajib pajak mengeluhkan dari sumber daya yang saat ini masih terbatas. Pihak aparatur pun mengeluhkan kurangnya komputer yang tersedia guna menunjang tugas pemungut pajak untuk dapat lebih gampang untuk mendata dan mencari data para wajib pajak yang ada di Kota Sukabumi.